



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

Nomor : *931* TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 278.1/ TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu ada penambahan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor ... tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 278.1/TAHUN 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dipedomani guna mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang optimal serta melaksanakan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 17 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 931 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 278.1/ TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

1. Penghapusan Barang Milk Daerah
2. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
3. Pengelolaan Penghematan Energi dan Air
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung Lainnya
5. Pelaksanaan Belanja Peralatan Rumah Tangga
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Pelaksanaan Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Pengelolaan Surat Keluar
12. Pengelolaan Pengeluaran Keuangan LS
13. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
14. Pengelolaan Pengeluaran Keuangan GU
15. Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Gaji
16. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
17. Pengelolaan Surat Masuk
18. Pengamanan Lingkungan Kerja
19. Pemeliharaan Lingkungan Kerja
20. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
21. Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB/DANEN/SKHU/SKYBS

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

22. Permohonan Mutasi Masuk
23. Penyusunan dan Monev Standar Pelayanan (SP)
24. Penyusunan Monev SOP
25. Penyusunan dan Monev Peta Proses Bisnis (PROBIS)
26. Penyusunan dan Monev Peta Jabatan
27. Penyusunan dan Monev Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
28. Pengusulan Rencana Kebutuhan Diklat
29. Pengusulan Pensiun Pegawai
30. Pengusulan Kenaikan Pangkat
31. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
32. Pengusulan Cuti Pegawai
33. Pengelolaan Presensi Pegawai
34. Pengajuan Keterangan Pendidikan, Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Gelar Akademik, dan Sebutan Profesi
35. Pengajuan Mutasi Keluar
36. Pengajuan Laporan Realisasi Kinerja Pegawai
37. Pengajuan KARIS, KARSU, KARPEG

38. Pengadaan Pakaian Dinas
39. Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
40. Penerbitan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
41. Penegakan Disiplin Pegawai
42. Penanganan Benturan Kepentingan
43. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
44. Fasilitasi Ijin Penelitian
45. Fasilitasi Praktek Kerja Industri/ Praktek Kerja Lapangan/Magang dan Sejenisnya

C. STADAR OPERASIONAL PROSEDUR KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

46. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis
47. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional OPD
48. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
49. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
50. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
51. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
52. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
53. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
54. Penyusunan Laporan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDALBANGDA)
55. Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahunan
56. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
57. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
58. Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan SKPD
59. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
60. Pengajuan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
61. Pelaporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Triwulan
62. Pelaporan Solo Data

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR

63. Pelaksanaan Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
64. Pelaksanaan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
65. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
66. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
67. Pengelolaan Barang Milik Daerah
68. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
69. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga/Sarpras, Utilitas Sekolah
70. Pembangunan Ruang Guru/UKS SD
71. Pangadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
72. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
73. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
74. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
75. Pengadaan Mebel Sekolah
76. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
77. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
78. Pengelolaan Rehabilisasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
79. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
80. Pengelolaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
81. Pemanbahan Ruang Kelas Baru
82. Pembangunan Unit Sekolah Baru
83. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
84. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

85. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
86. Verifikasi Perpindahan Orang Tua
87. Verifikasi Non Akademik
88. Verifikasi Luar Kota
89. Pengesahan Kurikulum
90. Pengelolaan Mutasi Siswa Keluar Daerah
91. Legalisasi Ijasah/STTB/Surat Pengganti Ijasah
92. Pengelolaan Hibah SD Swasta dan SD Inklusi
93. Pengelolaan Hibah BOSP SD Swasta
94. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
95. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
96. Pengadaan Perlengkapan Siswa
97. Pengajuan Tugasan Profesi Guru
98. Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Guru
99. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
100. Penilaian Angka Kredit
101. Pengajuan Pensiun
102. Pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG
103. Pemberian Cuti
104. Pengukuhan Gelar
105. Pengajuan Kenaikan Pangkat
106. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
107. Pengajuan Ijin Belajar

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

108. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Besar Perpustakaan Sekolah
109. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Besar Unit Kesehatan Sekolah
110. Pengelolaan Rehabilitasi Sedang/Besar Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
111. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
112. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
113. Penambahan Ruang Kelas Baru
114. Pembangunan Unit Sekolah Baru
115. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
116. Penyusunan POS Ujian Sekolah
117. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
118. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
119. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama
120. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
121. Pengadaan Perlengkapan Siswa
122. Legalisasi Ijasah/STTB/Surat Pengganti Ijasah
123. Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
124. Mutasi Siswa Keluar
125. Mutasi Siswa Masuk
126. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
127. Pengajuan Kenaikan Pangkat
128. Pengajuan Cuti
129. Pengajuan KARIS, KARSU, KARPEG
130. Penilaian ANGKA KREDIT (PAK) GURU
131. Pengajuan Tambahan Penilaian Guru Non Sertifikat
132. Pengajuan Tunjangan Profesi Guru

F. SOP BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

133. Pengajuan DAK Fisik Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (DAK Fisik)
134. Pengajuan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar PAUD
135. Pengajuan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam Ruangan PAUD
136. Pengajuan Rehabilitasi Kerusakan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

137. Pengajuan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD
138. Pengajuan Pengadaan Perlengkapan PAUD
139. Pengajuan Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
140. Pengajuan Pengadaan Mebel PAUD
141. Pengajuan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
142. Pengajuan Hibah Pendidikan Non Formal
143. Pengajuan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas PNF (DAK Fisik)
144. Pengajuan Rehabilitasi Kerusakan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PNF
145. Pengajuan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
146. Pengajuan Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pengajar PNF (DAK Fisik)
147. Pengajuan Rehabilitasi Kerusakan Sedang/Besar Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pengajar PNF
148. Pengajuan Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
149. Pengajuan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pengajar PNF
150. Pengajuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (DAK Fisik)
151. Pengajuan Rehabilitasi Kerusakan Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
152. Pengajuan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PNF
153. Pengajuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PNF
154. Pengajuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (DAK Fisik)
155. Pengajuan Pengadaan Mebel PNF
156. Pengajuan Pengadaan Alat Rumah Tangga PNF
157. Pengajuan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pengajar PNF (DAK Fisik)
158. Pengajuan Pengadaan Perlengkapan PNF
159. Pengajuan Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Lembaga Kesetaraan/PNF
160. Pengajuan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pengajar PNF
161. Pengajuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
162. Pengajuan Hibah PAUD
163. Pengajuan Pembangunan Unit Sekolah Baru PAUD
164. Pengajuan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pengajar PAUD (DAK Fisik)
165. Pengajuan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pengajar PAUD
166. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOP) Kesetaraan dan PAUD
167. Pelaksanaan Lomba Pendidikan Non Formal
168. Pengajuan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal
169. Pengelolaan Legalisir Ijazah/STTB/Surat Pengganti Ijazah Kesetaraan
170. Pengelolaan Mutasi Keluar Peserta Didik Pendidikan Non Formal (PNF)
171. Pelaksanaan Lomba PAUD
172. Pengajuan Mutasi Siswa Keluar Peserta Didik PAUD
173. Pengesahan Kurikulum
174. Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan PAUD
175. Pengajuan Akreditasi Lembaga PAUD
176. Pengajuan Hibah Kota
177. Pelaksanaan Diklat Pendidikan Non Formal
178. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
179. Pengajuan Ijin Belajar
180. Pengajuan Kenaikan Pangkat
181. Pengajuan Kukuh Gelar
182. Pemberian Cuti
183. Pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG
184. Pengajuan Pensiun
185. Pengajuan Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)
186. Penilaian Angka Kredit
187. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
188. Pengajuan Tunjangan Profesi Guru
189. Pengajuan Tambahan Penghasilan Guru
190. Pelaksanaan Diklat PAUD

G. SOP BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

191. Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Surakarta
192. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kota Surakarta
193. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Surakarta
194. Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kota Surakarta
195. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Surakarta
196. Pelaksanaan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Surakarta
197. Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Surakarta
198. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
199. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
200. Penerbitan Izin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
201. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
202. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
203. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
204. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
205. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
206. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
207. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
208. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
209. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
210. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
211. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
212. Pelayanan Rekomendasi Teknis Pendirian Sekolah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



DIAN RINETA